

## KESIAPAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA UNGGULAN PROGRAM WISATA HALAL (*HALAL TOURISM*) KOTA BANDA ACEH

Cut Nuryasmin<sup>1</sup>, M. Hafizul Furqan<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala

\*[mhafizulfurqan@usk.ac.id](mailto:mhafizulfurqan@usk.ac.id)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel:</b>                      Dikirim : 13-04-2023                      Disetujui : 20-05-2023                      Diterbitkan : 30-06-2023</p> <hr/> <p><b>Kata kunci:</b>                      Kesiapan, Pengelolaan, Objek Wisata, Halal Tourism</p>	<p><i>The purpose of this research was to determine the government support for the readiness of managing halal tourism destinations and to assess the readiness of destinations in managing halal tourism objects in Banda Aceh. The research method used is qualitative. The research was conducted at the Baiturrahman Grand Mosque, Syiah Kuala Tomb, Boat on a house, tsunami museum, and floating power plant. Data collection techniques involved interviews, with the informants being the Banda Aceh City Tourism Office and the managers of the prominent tourism objects in Banda Aceh. The data analysis technique employed basic triangulation. The research findings indicate that in terms of government support, the management of prominent tourism objects is still not fully prepared to implement halal tourism programs in Banda Aceh. However, from the destination aspect, it shows that the management of prominent tourism objects is ready to implement halal tourism programs in Banda Aceh.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap kesiapan pengelolaan objek wisata halal (<i>halal tourism</i>) dan untuk mengetahui kesiapan destinasi terhadap pengelolaan objek wisata halal (<i>halal tourism</i>) di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di masjid raya baiturrahman, makam Syiah Kuala, boat di atas rumah, museum tsunami dan PLTD apung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, informan dalam penelitian ini adalah dinas pariwisata Kota Banda Aceh dan pengelola objek wisata unggulan Kota Banda Aceh. Teknik analisis menggunakan triangulasi dasar. Hasil penelitian yang dilihat dari aspek dukungan pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata unggulan masih kurang siap untuk menerapkan program wisata halal (<i>halal tourism</i>) di Kota Banda Aceh. Namun dari aspek destinasi menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata unggulan sudah siap untuk menerapkan program wisata halal (<i>halal tourism</i>) di Kota Banda Aceh.</p>

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam suku, ras, agama dan berbagai keindahan alamnya yang membuat semua mata yang memandangnya menjadi terpicat. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau yang tersebar di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai sektor yang mampu untuk mendongkrak devisa negara. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang menjadi sumber devisa negara.

Pada era globalisasi saat ini, sektor pariwisata menjadi industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata ini akan menjadi pendorong utama dalam perekonomian dunia pada abad ke 21 dan menjadi salah satu industri yang mengglobal. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta telah meningkatkan jumlah dari kedatangan wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain (Soebagyo, 2018: 1).

Nunung (2009:1) dalam (Daly, 2019: 4) menyatakan bahwa Provinsi Aceh atau yang lebih dikenal dengan julukan Serambi Mekah

yang mayoritas penduduknya muslim adalah salah satu provinsi yang mempopulerkan pariwisata dan memiliki banyak tempat-tempat wisata yang cukup terkenal serta memiliki perencanaan yang bagus terhadap perkembangan pariwisata itu sendiri. Hampir seluruh daerah di Aceh mempunyai tempat wisata yang unik dan dapat dimanfaatkan. Model-model wisata yang ada di Aceh sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata itu sendiri, keberadaan perkembangan pariwisata tersebut juga dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan masyarakat Aceh. Keindahan pariwisata Aceh tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Aceh saja, namun juga dinikmati oleh orang dari luar Aceh.

Aceh merupakan provinsi yang telah menerapkan prinsip syariah, prinsip syariah ini tidak hanya untuk mengatur persoalan ibadah tetapi juga mendorong para pelaku wisata untuk mampu menerapkan wisata yang berbasis syariah. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cukup banyak potensi sumber daya alam yang menarik dan juga unik. Saat ini, objek wisata yang ada di Aceh tercatat sebanyak 978 spot wisata, mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner, dan cagar budaya (Humas Aceh, 2019:1).

Muhajirah, 2019: 2 menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh saat ini, mulai menerapkan wisata halal di daerah Kota Banda Aceh. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Program ini bisa menjadi salah satu daya tarik baru bagi para calon wisatawan yang ingin berwisata ke Kota Banda Aceh, sekaligus juga dapat meningkatkan citra kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Menurut Daly, 2019: 6, Pada 2016, Aceh berhasil mendapatkan penghargaan sebagai *World's Best Airport for Halal Travellers dan World's Best Halal Cultural Destination* dari *World Halal Tourism Award*.

Daly, 2019: 7 menyatakan bahwa dinas pariwisata Aceh saat ini sudah mulai menerapkan wisata halal, tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan wisata halal. Sebuah kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) baik di Dinas Pariwisata maupun di tempat wisatanya sendiri,

keterbatasan tenaga kerja, sumber daya manusia yang masih belum dapat memahami dengan baik tentang pariwisata halal (*halal tourism*), dari sisi fasilitas dan fakta di lapangan terlihat masih belum begitu maksimalnya bagian dari wisata halal (*halal tourism*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala dinas pariwisata Kota Banda Aceh dan pengelola objek wisata unggulan Kota Banda Aceh. Objek dalam penelitian ini adalah pariwisata halal dari objek wisata unggulan yang ada di Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semistruktur, dokumentasi dan lembar observasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung objek wisata halal di Kota Banda Aceh.

Melihat kesiapan destinasi wisata yang telah dikumpulkan dengan lembar observasi selanjutnya dianalisis menggunakan analisis metode deskriptif persentase dengan menggunakan rumus statistik sederhana yang dikemukakan oleh Suherman dan Sukarjaya (1991:71) dalam (Malik dan Minan, 2018: 88) yaitu:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

f: Jumlah frekuensi dari setiap jawaban

n: Jumlah responden

100: Nilai tetap

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh dalam % dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan kriteria yang dikemukakan oleh Maulana (2002:61) dalam (Malik dan Minan, 2018: 88) yaitu:

0% : Tidak satu pun

25% : Sebagian kecil

26 – 49% : Hampir setengah

50% : Setengah

51 – 75% : Hampir sebagian besar

76 – 100% : Sebagian besar

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### Objek Wisata Unggulan Kota Banda Aceh

Terdapat lima objek wisata unggulan di Kota Banda Aceh yaitu Masjid Raya Baiturrahman, Makam Syiah Kuala, PLTD Apung, Museum Tsunami dan Boat di Atas Rumah. Kelima Objek Wisata ini menjadi prioritas pemerintah dalam membangun objek wisata halal di Kota Banda Aceh.

### Aspek Dukungan Pemerintah

#### 1. Kebijakan

Kriteria kebijakan ini dilihat dari empat indikator yang berbeda. Indikator yang pertama yaitu dasar hukum dalam pengembangan objek wisata halal Kota Banda Aceh. Pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh dan pihak pengelola objek wisata unggulan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dasar hukum dalam pengembangan objek wisata halal adalah qanun no. 8 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Aceh dalam menyelenggarakan sektor pariwisata harus berasaskan iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal. Untuk merealisasikan asas tersebut Kota Banda Aceh melakukan pengembangan sektor pariwisata melalui program pariwisata halal.

Indikator kedua yaitu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pengembangan destinasi wisata halal, dari indikator kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi penerapan qanun sebagai pedoman dalam mengembangkan pariwisata halal, tidak hanya itu pihak pemerintah juga melakukan

#### 3. Pengembangan

Kriteria pengembangan dilihat dari enam indikator yang berbeda. Indikator pertama yaitu mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengembangan pariwisata halal, untuk indikator ini ternyata dari pihak pemerintah sendiri masih kurang aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap pengembangan objek wisata halal di Kota Banda Aceh kepada para wisatawan dan masyarakat sekitar Sosialisasi objek wisata halal di Kota Banda Aceh lebih banyak dilakukan oleh pengelola objek wisatanya sendiri bahkan ada yang disosialisasikan oleh para pihak lain seperti supir mobil sewaan sedangkan dari pihak

pemantauan terhadap objek wisata halal dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait yaitu seperti pihak satpol PP. Ada salah satu pihak pengelola objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu pihak pengelola PLTD Apung yang kurang memahami maksud dari pihak dinas pariwisata tentang kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan destinasi wisata halal Kota Banda Aceh.

Indikator ketiga yaitu dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan pariwisata halal, pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata halal di Kota Banda Aceh. Penyediaan sarana dan prasarana ini disambut cukup baik oleh pihak pengelola objek wisata Kota Banda Aceh.

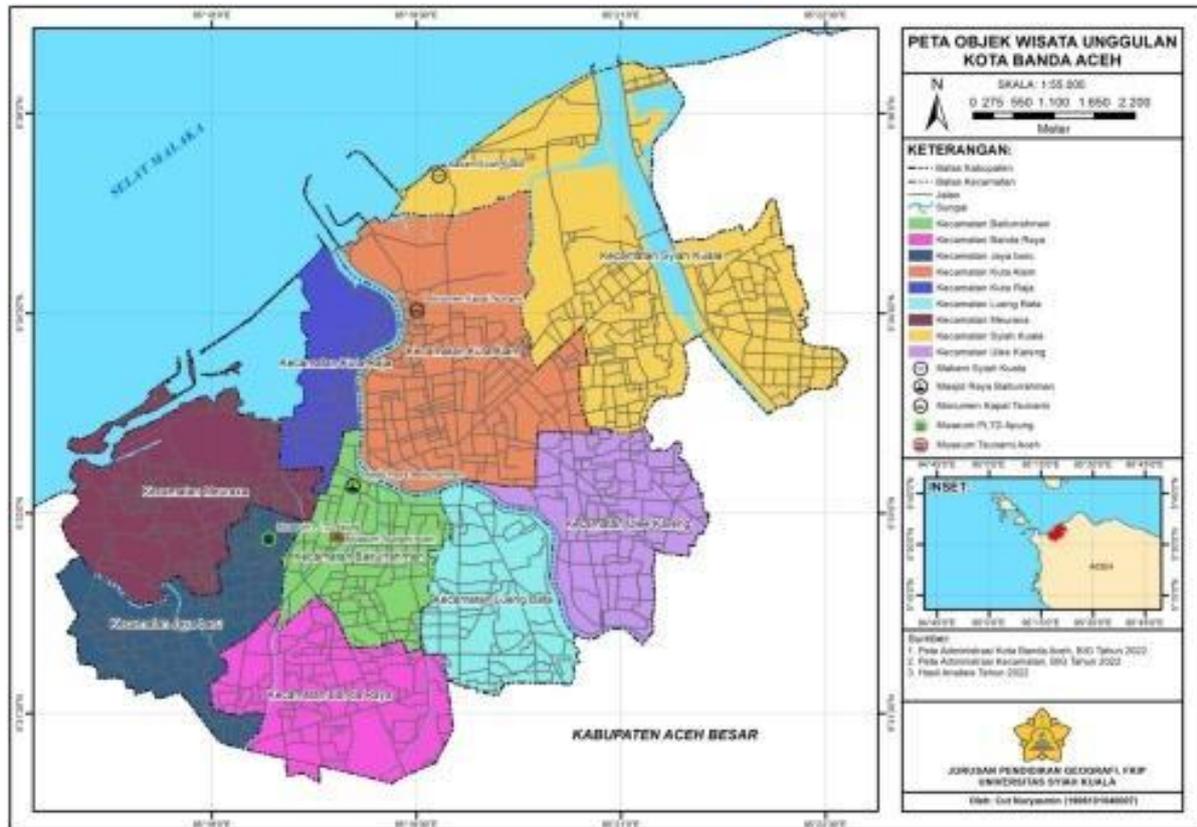
Indikator keempat yaitu pedoman pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh baik dari pihak dinas pariwisata dan pengelola objek wisata unggulan menyatakan bahwa pedomannya yaitu berupa qanun.

#### 2. Perencanaan

Dari segi perencanaan hanya ada satu indikator yang dilihat yaitu strategi yang pemerintah lakukan untuk dapat mengembangkan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Strategi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun dari pihak pengelola objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu wadah untuk mempromosikan objek wisata tersebut, seperti media sosial instagram serta menggunakan jasa konten kreator.

pemerintahnya sendiri bisa dibidang tidak ikut andil dalam hal sosialisasi pengembangan objek wisata halal. Salah satu faktor faktor yang menyebabkan pemerintah kurang ikut andil dalam mensosialisasikan objek wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu karena dalam 2 tahun belakangan ini Negara Indonesia khususnya Aceh mengalami wabah penyakit yaitu Covid-19.

Indikator kedua yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerapan pariwisata halal. Dari indikator ini menunjukkan bahwa pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh masih kurang memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan pariwisata halal



**Gambar SEQ Gambar\_ \\* ARABIC 1.** Peta Objek Wisata Unggulan Kota Banda Aceh, 2023

di salah satu objek wisata unggulan Kota Banda Aceh seperti PLTD Apung. Kurangnya pengawasan terjadi pada masa pandemi Covid-19. Namun, ada juga beberapa objek wisata dan pihak pengelolanya yang sudah mulai mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang cukup baik dari pemerintah.

Indikator ketiga yaitu terkait pemberian sertifikat usaha pariwisata halal oleh pemerintah kepada para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Para pelaku usaha pariwisata halal di Kota Banda Aceh tidak memiliki sertifikat usaha pariwisata halal dikarenakan dinas pariwisata tidak memiliki wewenang menerbitkan sertifikat halal.

Indikator keempat mengenai pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada para pelaku usaha wisata halal. Ada beberapa pihak pengelola objek wisata halal Kota Banda Aceh yang memang mendapatkan fasilitas pelatihan mengenai pariwisata halal dari pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh, seperti objek wisata PLTD Apung, Museum Tsunami dan Boat di atas rumah. Namun, ada juga pihak

pengelola objek wisata halal di Kota Banda Aceh yang tidak mendapatkan fasilitas pelatihan pariwisata halal, seperti objek wisata Masjid Raya Baiturrahman dan Makam Syiah Kuala. Salah satu faktor yang menghambat dalam menyediakan fasilitas pelatihan pariwisata halal yaitu karena terjadinya wabah penyakit Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 beberapa aktivitas harus terhenti salah satunya adalah aktivitas pelatihan dari dinas pariwisata kepada para pengelola objek wisata.

Indikator kelima yaitu pemberian dukungan oleh pihak MPU dalam hal pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Pengembangan objek wisata halal di Kota Banda Aceh tidak hanya melibatkan pihak dinas pariwisata dan pengelola objek wisata saja. Namun, pihak MPU juga ikut terlibat dalam kegiatan pengembangan objek wisata halal di Kota Banda Aceh.

Indikator keenam yaitu mengenai dukungan yang diberikan oleh pihak *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Ternyata pengembangan pariwisata halal di Kota Banda

Aceh tidak hanya didukung oleh pihak pemerintah saja namun, para *stakeholder* juga sangat mendukung dengan adanya pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

### Aspek Destinasi

#### 1. Tersedianya Toilet

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 100 % objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu ada masjid raya baiturrahman, museum tsunami, boat di atas rumah, makam syiah kuala dan PLTD Apung sudah memiliki toilet yang layak dan juga terpisah antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari segi toiletnya maka sudah memenuhi salah satu standar dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh.

#### 2. Tersedianya Mushola/Masjid

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka, 100% objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu ada masjid raya baiturrahman, museum tsunami, boat di atas rumah, makam syiah kuala dan PLTD apung telah memenuhi standar dalam pengembangan pariwisata halal dilihat dari segi tersedianya mushola yang memiliki kelengkapan untuk beribadah dari kelima objek wisata tersebut.

#### 3. Tersedianya Jasa Makanan dan Minum yang Memiliki Sertifikat Halal/Logo Halal

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dari kelima tempat objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu ada masjid raya baiturrahman, museum tsunami, boat di atas rumah, makam syiah kuala dan PLTD apung, menunjukkan bahwa 100% para pelaku usaha dibidang makanan dan minuman di sekitar kelima tempat objek wisata tersebut menjual makanan dan minuman yang memang sudah berlogo halal. Jadi, dari segi makanan dan minuman yang dijual di sekitaran objek wisata telah memenuhi standar dalam pengembangan wisata halal (*halal tourism*).

#### 4. Pramuwisata dan tenaga pelayan berpakaian dan berpenampilan sopan

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 100% objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu ada masjid raya baiturrahman, museum tsunami, boat di atas rumah, makam syiah kuala dan PLTD apung telah memenuhi standar dalam pengembangan pariwisata halal yang

dilihat dari segi pakaian dan penampilan yang sopan.

#### 5. Adanya Petunjuk Arah Menuju Tempat Ibadah

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa 100 % objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu ada museum tsunami, boat di atas rumah, PLTD apung dan makam syiah kuala sudah memenuhi standar dalam pengembangan objek wisata halal di Kota Banda Aceh yang dilihat dari segi adanya petunjuk arah menuju tempat ibadah.

#### 6. Adanya Himbauan Dari Pihak Pengelola Objek Wisata Untuk Berpakaian Secara Islami Dan Berperilaku Sopan

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 100% objek wisata unggulan Kota Banda Aceh yaitu ada masjid raya baiturrahman, PLTD apung, makam Syiah Kuala, boat di atas rumah dan museum tsunami sudah menerapkan himbauan agar para wisatawan yang datang dapat berpakaian secara islami dan juga berperilaku secara sopan. Hal ini juga berlaku kepada para wisatawan asing yang non muslim, apabila mereka memakai pakaian yang kurang sopan maka, pihak pengelola objek wisata yang bersangkutan akan menegur mereka dan memberikan mereka selendang, sarung atau rok bagi pengunjung perempuan yang mengenakan pakaian kurang sopan dan bagi pengunjung laki-laki akan diberikan sarung agar mereka juga bisa menikmati objek wisata yang ada namun, tidak melanggar ketentuan yang telah diterapkan pada setiap objek wisata. Metode yang digunakan dalam penyampaian himbauan ini ada yang secara tertulis dan ada juga himbauannya yang disampaikan secara lisan.

### PEMBAHASAN

Provinsi Aceh saat ini telah menerapkan prinsip syariat islam yang disebut dengan qanun, yang mana fungsi dari qanun ini sendiri tidak hanya bertujuan untuk mengatur persoalan beribadah namun juga untuk dapat mendorong para pengelola objek wisata agar mampu menerapkan wisata yang berbasis syariat (Humas Aceh, 2019). Penerapan wisata yang berbasis syariat ini sesuai dengan program dari pemerintah Aceh sendiri yang mana pihak dari dinas pariwisata Kota Banda Aceh saat ini sedang mengembangkan objek wisata halal di Kota Banda Aceh.

Pariwisata halal sendiri adalah suatu jenis kegiatan berwisata yang berlandaskan kepada syariat Islam jadi, setiap kegiatan yang dilakukan ketika berwisata tidak boleh menyimpang dari syariat Islam itu sendiri. Pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh mulai mengembangkan program pariwisata halal di Kota Banda Aceh karena melihat dari mayoritas penduduk Aceh sendiri adalah muslim.

Standar dari pengembangan wisata halal (*halal tourism*) yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu ada aspek destinasi, aspek dukungan pemerintah, aspek sumber daya manusia dan aspek infrastruktur (Surur, 2020). Pengembangan program wisata halal (*halal tourism*) di Kota Banda Aceh ini hanya ditinjau berdasarkan dari dua aspek yang berbeda, yaitu ada aspek dukungan dari pemerintah yang dilihat dari tiga kriteria berbeda yaitu ada dari segi kebijakan, perencanaan dan pengembangan, serta yang kedua ada aspek destinasi yang dilihat hanya dari kriteria atraksinya. Kedua aspek yang menjadi tinjauan dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh ini sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kementerian pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima objek wisata unggulan di Kota Banda Aceh antara lain objek wisata museum tsunami, PLTD apung, makam Syiah Kuala, masjid raya baiturrahman dan boat di atas rumah. Dari kelima objek wisata tersebut, semuanya menjadi prioritas dalam pengembangan objek wisata halal (*halal tourism*) di Kota Banda Aceh.

Pengembangan objek wisata halal (*halal tourism*) di Kota Banda Aceh apabila dilihat dari aspek dukungan pemerintah pada kriteria kebijakan menunjukkan bahwa ada satu item dari kriteria kebijakan yaitu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata halal, item ini sedikit mengalami hambatan bagi beberapa pengelola objek wisata karena ada beberapa pengelola objek wisata

yang kurang memahami maksud dari kebijakan yang diberikan oleh pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh. Hal ini menyebabkan antara pihak pengelola objek wisata dengan pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh mengalami miskomunikasi.

Kemudian, bila dilihat dari kriteria perencanaan menunjukkan bahwa kriteria ini sudah berjalan secara optimal. Pihak pengelola objek wisata bisa memahami dengan baik maksud yang disampaikan oleh pihak dinas pariwisata Kota Banda Aceh terkait dengan item yang ada pada kriteria perencanaan.

Sedangkan untuk kriteria pengembangan menunjukkan ada empat item dari kriteria pengembangan yaitu ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengembangan pariwisata halal yang ada di Kota Banda Aceh, pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penerapan pariwisata halal, pemberian sertifikat usaha halal oleh pemerintah kepada para pelaku usaha pariwisata halal di Kota Banda Aceh, dan penyediaan fasilitas pelatihan pariwisata halal oleh pemerintah kepada para pelaku usaha pariwisata. Beberapa pengelola objek wisata masih kurang memahami maksud yang disampaikan oleh pihak dinas pariwisata terkait dengan keempat item tersebut. Hal ini juga disebabkan karena kasus Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Banda Aceh dalam dua tahun belakangan ini, hal ini menjadi hambatan bagi pengelola objek wisata dalam menerapkan dan memahami beberapa acuan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada kelima objek wisata unggulan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa apabila dilihat dari aspek destinasi dengan kriteria atraksi maka objek wisata boat di atas rumah, PLTD apung, masjid raya baiturrahman, makam Syiah Kuala dan museum tsunami sudah memenuhi keenam item dari kriteria atraksi yang menjadi acuan dalam pengembangan objek wisata halal (*halal tourism*) di Kota Banda Aceh.

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang “Kesiapan Pengelolaan Objek Wisata Unggulan Program Wisata Halal (*Halal Tourism*) Kota Banda Aceh” maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal

(*halal tourism*) di Kota Banda Aceh ditinjau dari dua aspek yaitu ada aspek dukungan dari pemerintah yang menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata unggulan masih kurang siap untuk menerapkan program wisata halal (*halal tourism*) di Kota Banda Aceh dan aspek destinasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata unggulan sudah siap untuk menerapkan program wisata halal (*halal tourism*) di Kota Banda Aceh.

#### REKOMENDASI

Pengetahuan kesiapan pengelolaan objek wisata halal *halal tourism* sangat penting dimiliki oleh para pengelola objek wisata, maka dari itu pemerintah daerah perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara rutin agar dapat menambah wawasan para pengelola objek wisata.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Syiah Kuala, atas dukungan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, ucapan terimakasih juga kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan semua pihak yang telah membantu selama penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daly, Fajar Peunoh. (2019). *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry], Banda Aceh.
- Elsa, Dian Febriyanti dan Hasanah, Irmatul. (2021). Analisis Faktor-Faktor Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Banten. *Jurnal Tazkiya* 22 (1) 13-22.
- Humas Aceh. (2019). Wisata Halal Andalan Pariwisata Aceh. (online). <http://humas.acehprov.go.id/wisata-halal-andalan-pariwisata-aceh/> Diakses padatangal 14 febuari 2022.
- Malik, Adam dan Minan Chusni. (2018). *Pengantar Statistik Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhajirah. (2019). *Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Halal Di Kota Banda Aceh*. [KTI, Universitas Syiah Kuala], Banda Aceh.
- Nurfadila. (2018). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang*. (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Soebagyo, Soebagyo. (2018). "Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia." *Liquidity* 1 (2): 153–58. <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.145>.